Radar Bali

Aset Civic Center Bermasalah

Surat Sekprov Bali Dituding Bodong

DENPASAR - Aset Pemprov Bali berupa Kantor Pos Giro dan Gedung Nari Graha kini dipermasalahkan. Pasalnya, ahli waris dari (alm.) I Gusti Ngurah Togor yang sebelumnya memiliki tanah di dua lokasi, itu mengaku belum mendapatkan dua bidang tanah pengganti. Sementara Pemprov melalui surat Sekretaris Provinsi Bali No.593/665/PA.Aset menyatakan proses tukar menukar tanah untuk lokasi Civic Center tersebut telah selesai secara administrasi.

"Surat Sekda (Sekprov, red) ini bodong, penerimanya kosong," ujar Kuasa Hukum Ahli Waris dari (alm) I Gusti Ngurah Togor, I Ketut Kesuma, saat bertemu Komisi I DPRD Bali dan Biro Aset Pemprov di DPRD Bali, kemarin (4/6).

Kesuma menjelaskan, dalam surat tertanggal 4 Maret 2014 itu disebutkan bila tanah yang digunakan untuk Kantor Pos Giro adalah milik Bukti Pemerajan Titih/Belaluan, Banjar Belaluan, Desa Dangin Puri. Tanah ini mendapat penukar di Subak Abianbase, Kuta dengan Persil 97.a. Sedangkan tanah yang digunakan untuk Gedung Nari Graha, dalam surat dikatakan milik I Rentug dari Banjar Sengguan Pagan, Desa Sumerta, Denpasar Timur. Tanah ini mendapat penukar di Subak Tebe, Desa Kapal, Mengwi dengan Persil 87 dan Persil 91. Dengan kata lain, surat Sekprov sama sekali tidak menyebutkan nama I Gusti Ngurah Togor sebagai pemilik atau pun penerima tanah pengganti.

"Setelah kami telusuri I Rentug, ternyata banjarnya tidak ada. Camat Denpasar Timur menyatakan Banjar Sengguan Pagan dari dulu sampai sekarang tidak ada di Denpasar Timur. Sedangkan dari Puri Titih Belaluan telah membuat surat pernyataan bahwa tanah yang digunakan sebagai Kantor Pos sekarang memang benar milik I Gusti Ngurah Togor dan bukan merupakan tanda bukti merajan Titih Belaluan," jelas Kesuma.

Pihaknya menyimpulkan bila penerima tanah pengganti yang tertulis dalam surat Sekprov adalah fiktif. Seandainya masalah ini tidak bisa diselesaikan, lanjut Kesuma, ahli waris dari Togor akan menduduki kembali Kantor Pos Giro dan Gedung Nari Graha.

Sementara itu, Biro Aset Pemprov Bali yang diwakili I Made Arbawa dan Sukertayasa mengakui dokumen tentang I Gusti Ngurah Togor memang ada. Namun, keduanya tidak membawa dokumen itu ke DPRD Bali lantaran undangan dewan tidak menyinggung soal tanah milik Togor tersebut."Secara administrasi sudah selesai, namun masalah-masalah yang baru sekarang muncul adalah karena masyarakat pada terjadinya tukar menukar artinya belum diurus masalah tukar menukarnya," ujar Sukertayasa.

Mendengar jawaban itu, Komisi I DPRD Bali pun merasa tidak puas. Pasalnya, Biro Aset tidak bisa menyebutkan dengan jelas siapa penerima tanah pengganti dari Pemprov Bali. Apakah sudah benar sesuai dengan proses tukar menukarnya."Tanahnya ada *nggak* itu, kan itu yang penting. Jadi biar tidak ngeributin surat, terus nggak ada tanahnya. Kalau sudah ada yang menerima, apakah berhak menerima itu? Kalau tidak berhak kenapa bapak berikan itu? Kan itu penelusurannya nanti," ujar anggota Komisi I, I Nyoman Adnyana. Dewan akhirnya memutuskan untuk mengundang kembali dua belah pihak dengan data yang lebih lengkap. **(pra/han)**

Edisi : _____

Hal : _____

Radar Bali

Badung Kembali Raih WTP dari BPK RI

ISTIMEWA

BERTAHAN: Piagam penghargaan yang ditandatangani anggota VI BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Arman Syifa, MAcc, AK.CA kepada Bupati Badung A.A. Gde Agung di ruang pertemuan Kantor BPK RI, Kamis (4/6) kemarin.

MANGUPURA – Secara berturut-turut Pemkab Badung berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2011, dan tahun 2012 serta sempat jeda dengan opini tidak wajar atas LHP LKPD tahun 2013. Kini Badung kembali meraih opini WTP atas LHP LKPD tahun 2014. Atas kerja keras segenap jajaran Pemkab Badung, BPK RI Perwakilan Bali memberikan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Badung yang meraih opini WTP atas hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah tahun 2014.

Piagam penghargaan yang ditandatangani anggota VI BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Arman Syifa, MAcc, AK.CA kepada Bupati Badung A.A. Gde Agung di ruang pertemuan Kantor BPK RI, Kamis (4/6) kemarin.

Selain menyerahkan piagam kepada Bupati, BPK Perwakilan Provinsi Bali juga menyerahkan LHP atas LKPD tahun 2014 kepada Ketua DPRD Badung I Nyoman Giri Prasta. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Arman Syifa menjelaskan, bahwa pada tahun 2015 BPK RI telah melaksanakan tugas konstitusional yakni melakukan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Badung tahun 2014. "Kami memberikan apresiasi atas langkah-langkah serta upaya-upaya perbaikan yang sangat signifikan yang telah dilakukan oleh Bupati Badung beserta segenap jajaran Pemkab Badung," ujarnya.

Ketua DPRD Badung, I Nyoman Giri Prasta menyampaikan, atas nama pimpinan serta lembaga DPRD menyampaikan apresiasi kepada BPK yang telah melaksanakan tugas konstitusional dalam malaksanakan pemeriksaan di Badung. Sementara itu, Bupati Badung Anak Agung Gde Agung, usai menerima piagam penghargaan mengungkapkan, apresiasi dan ucapan terimakasih kepada segenap Tim Pemeriksa BPK yang telah melaksanakan tugas profesional dan konstusionalnya dalam melakukan pemeriksaan di Kabupaten Badung.

Terkait Opini WTP yang merupakan opini tertinggi ini, Bupati Gde Agung mengungkapkan dalam perjalanan sejarah pemerintahan di Badung sejak awal menjabat Bupati Badung telah berhasil meraih 3 (tiga) kali opini WTP, walaupun pernah jeda LHP untuk tahun 2013 dengan opini tidak wajar. Dari opini tidak wajar yang pernah diraih bukan membuat pemkab terpuruk namun justru segenap jajaran dengan dukungan dewan menjadi bangkit kembali untuk melakukan perbaikan dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan sesuai dengan rekomendasi BPK RI. "Opini WTP berturut-turut kemudian pernah dinilai tidak wajar, bukan membuat kami terpuruk apalagi frustasi namun justru kami jadikan sebagai pemantik dan pemicu semangat bersama untuk melakukan berbagai pembenahan," paparnya.

Dengan opini kali ini, hingga saat ini Badung telah berhasi meraih opini WTP sebanyak 3 kali yakni atas LHP LKPD 2011, 2012 dan 2014. Bagi Bupati Gde Agung yang sebentar lagi akan purna tugas memandangnya sebagai *legasi* atau warisan yang baik bagi Pemerintah kabupaten Badung. Yakni dengan meninggalkan tugas dan jabatan dalam kondisi masyarakat yang semakin makmur dan sejahtera.

Turut hadir Pimpinan DPRD Badung, Wakil Ketua DPRD Badung I Ketut Suiasa dan I Made Sunarta, Inspektur Luh Suryaniti, Sekwan I Made Wira Dharmajaya, Kabag Keuangan I Ketut Gede Suyasa, Kabag Humas dan Protokol A.A. Gede Raka Yuda dan kabag Perlengkapan dan Aset Daerah I Wayan Puja. **(advetorial/san)**

Edisi : Jumat, 5 Juni 2015

Hal : 24

Radar Bali

PENDAMPINGAN

IST

KERJA SAMA: Rombongan BPKP Bali saat bertemu Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata.

Gianyar Gandeng BPKP dan KPK

GIANYAR – Upaya membenahi tata laporan keuangan daerah bagi Pemkab Gianyar ternyata tidak pernah surut dilakukan. Sebab meski sudah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali.

Siang kemarin (4/6) Pemkab Gianyar juga menerima rombongan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali guna pelaksanaan koordinasi, supervisi dan pencegahan (Korsupgah) korupsi tahun 2015. Korsupgah ini pun sekaligus menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Didik Krisdiyanto mengungkapkan, maksud dan tujuan kedatangannya ke Gianyar untuk melakukan pendampingan dalam upaya pencegahan tindak korupsi pada pengelolaan keuangan. Langkah ini pun sejalan dengan raihan Gianyar yang telah berhasil mendapatkan opini WTP dari BPK Provinsi Bali.

Dia menambahkan, dalam Korsupgah 2015 nanti, pemantauan akan difokuskan pada pengelolaan APBD. Pengelolaan yang dimulai dari proses perencanaan dan pelaksanan anggaran, dana hibah, bansos, serta pengadaan barang dan jasa, hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Kami harap kerja samanya untuk memberikan informasi dan data yang terbuka. Sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan korupsi. Kami datang untuk pencegahan, bukan untuk penindakan," tegasnya.

Karena itu, ke depan dia berharap dengan pendampingan yang akan dilakukan BPKP bersama KPK, akan membuat opini WTP bagi Gianyar bisa dipertahankan. Apalagi pelaksanaan Korsupgah tersebut sesuai rencana akan dimulai Juni dan berlangsung selama 25 hari, sebelum dilanjutkan dengan semiloka pada Oktober mendatang. Semiloka yang bakal menggunakan anggota DPRD, LSM serta elemen masyarakat Gianyar.

"Jadi setelah dua pekan pelaksanaan Korsupgah, BPKP bersama KPK akan melaksanakan diskusi di masing-masing bidang. Diskusi yang membahas resiko-resiko dan upaya pengendalian," sambungnya dihadapan perwakilan anggota DPRD Gianyar, Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata, Sekkab Gianyar IB Gaga Adi Saputra, serta pimpinan SKPD. "Komitmen untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik akan terus dilakukan dengan berbagai pihak," kata Bupati Bharata. **(wid/gup)**

Edisi : Jumat, 5 Juni 2015

Hal : 25

Radar Bali

Gianyar pun Meraih WTP

GIANYAR – Beragam terobosan, terutama kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Pemkab Gianyar akhirnya membuahkan hasil. Lantaran kerja keras tersebut, mengantarkan Kabupaten Gianyar meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2014 ini diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bali Arman Syifa. Penyerahan itu diterima Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta bersama Bupati Gianyar Anak Agung Gde Agung Bharata, serta didampingi Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Ida Bagus Gaga Adi Saputra di Ruang Rapat lantai III Kantor BPK Perwakilan Bali.

Raihan ini pun terbilang istimewa bagi Gianyar. Sebab opini WTP tersebut sekaligus menjadi WTP pertama yang pernah diraih Gianyar atas LKPD. Pasalnya sebelumnya Gianyar sendiri selalu berkutat dengan raihan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Bali Arma Syifa mengungkapkan, terkait LHP Pemkab Gianyar tahun anggaran 2014, BPK berpendapat bahwa neraca Pemkab Gianyar per-31 Desember 2014, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

HUMAS PEMKAB GIANYAR FOR RADAR BALI

PLONG: Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata (kanan) menerima penghargaan WTP dari Kepala BPK Bali Arman Syifa di Kantor BPK Bali, kemarin.

Selain itu, BPK juga mengapresiasi upaya perbaikan yang dilakukan Pemkab Gianyar. Hal ini karena sebagian besar tindak lanjut atas rekomendasi BPK telah sesuai dengan *action plan* yang dibuat oleh Bupati Gianyar. Sehingga LKPD Pemkab Gianyar tahun anggaran 2014 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan.

"Keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan dan komitmen DPRD Gianyar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pengawasannya," papar Bupati Bharata.

Selain itu, dengan raihan WTP yang kali pertama digenggam Pemkab Gianyar ini, dia berharap apa yang menjadi visi; *Gianyar Bagus*, yakni: Bersih, Alami, Giat, Berbudaya, dan Sejahtera menuju Jagadhita, dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Gianyar. **(wid/djo)**

Edisi : Jumat, 5 Juni 2015

Hal : 21

Radar Bali

Kabag Keuangan Diperiksa

Terkait Kasus Perdin Denpasar

DENPASAR - Kasus perjalanan Dinas (Perdin) di Pemkot Denpasar kembali digeber. Kali ini yang diperiksa adalah Kabag Keuangan Pemkot Denpasar Made Widra dan Kasubag Perbendaharaan Setwan (Sekretariat Dewan) Kota Darma Wijaya. Dua orang ini adalah pemeriksaan terakhir, dan akan dilanjutkan dengan ekspose atau gelar perkara di BPKP sebelum kasus ini dinaikkan statusnya ke penyidikan.

Untuk Widra diperiksa oleh Jaksa Luga Harlianto sedangkan Wijaya diperiksa oleh Jaksa Lumi Sensi. Dua orang ini sudah diperiksa sejak pukul 09.00. Dan Widra selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 13.00. "Saya diperiksa terkait perjalanan dinas. Saya ini *kok* difoto, besok saya jadi bintang ini," ungkap Widra saat turun tangga Kejari Bali.

Usai pemeriksaan Kajari Denpasar Imanuel Zebua sempat masuk ke ruangan Luga. Kemudian sempat ngobrol dengan Luga. "Sudah - sudah jelas, kasus ini lanjutkan," ungkapnya. Namun ketika ditanya, Zebua mengatakan apalagi ditanya. "*Kan* sudah jelas, jangan tanya - tanya lagi," celetuknya sambil tertawa menuju ruangannya.

Menurut Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir dua orang ini adalah pemeriksaan terakhir dalam kasus Perdin Kota Denpasar. "Udah habis *kayaknya, nggak* terlalu pelik sebenarnya kasus ini," ungkap Syahrir. Kemudian dia mengatakan setelah pemeriksaan ini, akan dilakukan proses perapian data dan berkas. Selanjutnya akan dilakukan ekspose di BPKP, untuk nanti mencocokkan angka kerugian versi kejari. "Setelah ekspose naik *dah* ke penyidikan," ungkap Syahrir.

Namun Syahrir tidak menjelaskan apakah jika penyidikan sudah ada tersangka atau belum. "Kami belum bisa jelaskan masalah itu," ungkapnya.

Seperti halnya berita dalam kasus ini, ada temuan kelebihan bayar Rp 565 juta lebih dalam APBD Pemkot 2013. **(art/yes)**

Edisi : Jumat, 5 Juni 2015

Hal : 35

Radar Bali

KASUS CPNS TABANAN

KETUT SUGINA/BALI EXPRESS

DIPERIKSA LAGI: Gede Jagrem saat berada di Kejari Tabanan, kemarin.

Giliran Jagrem Diperiksa Kejari

TABANAN - Setelah sehari sebelumnya kejari memeriksa tersangka Candra Dewi, kini giliran I Gede Jagrem yang diperiksa. Jagrem dicerca 65 pertanyaan dari pukul 10.00 wita hingga pukul 15.30, Kamis (4/6).

Baik Candra Dewi dan Jagrem adalah tersangka yang telah ditetapkan Kejari Tabanan dalam kasus dugaan pemerasan CPNS di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Tabanan ■

▸ *Baca **Giliran...** Hal 35*

Tersangka Tetap Tak Akui Perbuatannya

■ **GILIRAN...**

Sambungan dari hal 21

Jagrem datang ke Kejari Tabanan dengan berpakaian adat putih-putih. Dia ditemani pengacaranya I Nyoman Nadayana, SH.MM. Sama seperti Candra Dewi, Jagrem diperiksa oleh dua orang tim penyidik di aula Kajari Tabanan lantai dua. Saat keluar dari kantor Kejari, raut muka Jagrem tampak kesal melihat awak media menunggunya. Saat ditanya terkait pemeriksaan dirinya diapun enggan menjawab. "Kenapa *ya* setiap saya diperiksa beritanya besar-besar, ada konspirasi apa ini?" ucap Jagrem sambil berlalu.

Sementara Pengacara Jagrem, Nadayana mengungkapkan kalau kliennya diperiksa untuk mempertegas pemeriksaan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya saat status Jagrem masih sebagai saksi. "Ini memang pemeriksaan kali pertama setelah menjadi tersangka, namun sebelumnya klien saya pernah diperiksa sebagai saksi, dan kali ini mempertegas keterangannya itu," ucap Nadayana.

Disinggung materi pemeriksaan dikatakan hampir sama yakni soal sistem rekrutmen tenaga kontrak di DKP dan tentang penilaian kinerja pegawai. "Klien saya tetap pada jawaban sebelumnya saat diperiksa sebagai saksi, karena memang itu realita yang ada," tandasnya.

Pihaknya juga menegaskan hendaknya semua pihak berpedoman pada asas praduga tak bersalah. "Prosesnya *kan* masih panjang, apalagi belum ada keputusan. Kami juga akan membedah pasal 368 untuk melihat darimana unsur pemaksaan dan pemerasannya," katanya.

Sementara itu Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tabanan, Fatur Rochman saat disinggung bahwa tersangka tetap tak mengakui perbuatannya, ia hanya menjawab itu hak setiap individu. "Itu haknya dia, tapi akan kita buktikan di pengadilan nanti," tegasnya. Dirinya mengatakan, tersangka Jagrem kembali diperiksa oleh dua penyidik dengan 65 pertanyaan. "Untuk materi saya tidak mau berkomentar," ucapnya.

Seperti diberitakan kemarin setelah menetapkan dua tersangka, Kejari untuk kali pertamanya memeriksa Candra Dewi yang juga Kasubag Hukum dan Kepegawaian di DKP sebagai tersangka. Saat diperiksa selama 7,5 jam oleh tim penyidik Candra Dewi meneteskan air mata, Rabu, (3/6) lalu Candra Dewi meneteskan air mata. "Saya ini kesal, bukan takut, kesal karena apa yang dituduhkan tidak saya lakukan dan tidak benar," ucap candra dewi. **(gin/yes)**

Edisi : Jumat, 5 Juni 2015

Hal : 21 dan 35

Radar Bali

KORUPSI

Jabatan Suwitra Dicopot

SINGARAJA – Jabatan Made Suwitra, tersangka kasus korupsi pembangunan Jembatan Pangkung Api di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, akhirnya dicopot. Suwitra dihentikan sementara dari jabatannya, sekaligus dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS), sampai dengan status hukumnya memiliki kekuatan hukum tetap.

Status Made Suwitra sebagai Kepala Bidang Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum, disebut dicopot sejak Senin (1/6) lalu. Setelah Badan Pertimbangan Kepangkatan (Bapek) Buleleng, mengkaji status hukum Suwitra. "Sudah diberhentikan sementara waktu dari jabatannya. Jadi sekarang yang melaksanakan tugas-tugas di bidang bina marga, langsung Pak Kepala Dinas PU (Nyoman Gede Suryawan)," kata Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka kemarin. Terkait dengan penyelesaian administrasi proyek rehabilitasi jalan di Kabupaten Buleleng, akan dilakukan Sekretaris Dinas PU Buleleng Supartawa Wijaya. Supartawa langsung menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) di Dinas PU Buleleng.

Setelah dicopot dari jabatannya, nafkah-nafkah Suwitra juga dihentikan untuk sementara waktu. "Logikanya *kan* demikian. Yang bersangkutan tidak melakukan tugasnya sebagai pegawai karena sedang dalam masa penahanan. Makanya tidak kami berikan nafkahnya," imbuh Puspaka. Sementara untuk status selanjutnya, Puspaka yang juga mantan Kepala Bappeda Buleleng itu menyatakan masih menunggu proses persidangan, sampai dengan memiliki kekuatan hukum tetap. **(eps/gup)**

Edisi : Jumat, 5 Juni 2015

Hal : 33

Radar Bali

MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

IMAK: Terdakwa Ida Bagus Made Oka (kanan) mendengarkan keterangan tiga saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pipanisasi Karangasem di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin.

Pipanisasi, 10 Saksi Diperiksa

DENPASAR – Kasus korupsi pipanisasi Karangasem, dengan terdakwa Ida Bagus Made Oka dilanjutkan sidangnya di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin. Dengan agenda pemeriksaan saksi, jaksa kemarin menghadirkan 10 saksi. Kasus ini sebelumnya sudah memvonis satu terdakwa yaitu Mantan Kadis PU Wayan Arnawa.

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Hasoloan Sianturi dengan Jaksa Putu Gede Juliarsana. Terdakwa Oka, didampingi pengacara Hidayat Permana dan Made Sukaardana. Saksi yang dihadirkan adalah, I Komang Yasa (Panitia Pengadaan), Ketut, Sukarja (Dinas PU Karangasem), I Gusti Nyoman Darma Putra (Konsultan Pengawas), I Nyoman Suarta, Wayan Sudarsana (Kabag Keuangan), Wayan Sukerti (Bendahara), Agus Beni (Notris) dan Novinati yang adalah keponakan Bupati Geredeg dengan jabatan Koordinator Pengawas. keterangan saksi memang rata – rata sama dengan sidang terdakwa Arnawa sebelumnya. Misalnya Gusti Nyoman Darma Putra mengaku kaget setelah diperlihatkan pipa yang disita oleh kejaksaan. Pasalnya, ada perbedaan ketebalan pipa. "Saya kaget setelah diperiksa di Jaksa," ungkapnya.

Sedangkan Kabag Keuangan Karanagsem, Wayan Sudarsana sempat menjelaskan terkait anggaran pengerjaan proyek pipanisasi yang dianggarkan melalui APBD 2009 dan 2010. Ia mengatakan awalnya, nilai proyek tersebut dianggarkan Rp 31 miliar. Namun dalam anggaran perubahan APBD 2009 diturunkan menjadi Rp 27 milliar. Dan PT Adhi Karya sebagai pemenang dengan nilai Rp 26,4 miliar.

Sedangkan saksi Nopiyanti, menjelaskan tugasnya turun ke lapangan. Namun dia berkilah tidak sampai melakukan pengecakan pipa. Karena dalam RKS (Rencana Kegiatan dan Syarat) hanya mencantumkan jenis pipa yang digunakan tapi tidak mencantumkan merek. Nopi mengaku baru mengetahui jika pipa tersebiut tidak sesuai setelah pihak ITB (Institut Teknologi Bandung) turun melakukan pengecekan ke lapangan. "Di sana baru saya tahu kalau pipa tidak sesuai," jelasnya. **(art/han)**

Edisi : Jumat, 5 Juni 2015

Hal : 24